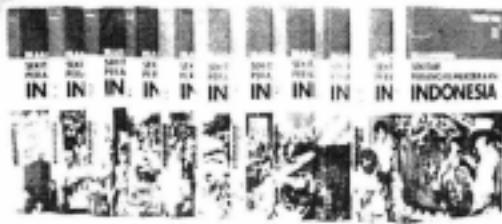
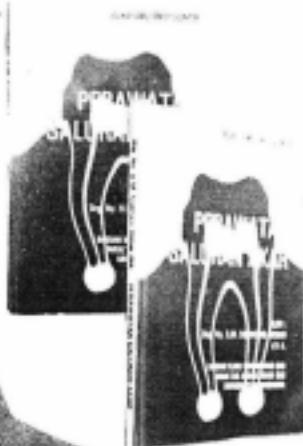


# OPTIMIS

BULLETIN BULANAN HIMPUNAN MASYARAKAT PENCINTA BUKU



HIMPUNAN BUKU ANDA



BACA  
KETERANGAN  
DI HALAMAN DALAM

## Resopim Dalam Dekade '80-an

Tulisan ini sans sekali tidak bermakna membawa kita kembali pada kenangan masa jaya Presiden R.I. panama H. Soekarno di mana salah satu pencapaian yang terkenal diberinya judul RESOPIM. Tapi catatan kita memasuki dekade '80-an sekarang ini kiranya tidak dengan judul tersebut, mungkin dapat memberikan inspirasi pada kita dalam usaha menciptakan permasalahan bangsa dan negara yang kita hadapi sekarang dan mendatang.

Mari kita lihat RESOPIM tidak dalam sementara besar Soekarno, tapi dalam semangat sederhana yang mungkin terjangkaunya dalam kepentingan yang kita miliki diawal ini.

RESOPIM yang merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan untuk telaga sekarang kedengarannya mungkin keliru garang atau "membahayakan". Tapi orang baik yang menjalani nasip tidak, bisa mendengar kata revolusi sekarang ini, jantungnya pasti berdebar seperti melihat bayangan tentu di malam Jum'at. Aneh, padahal kata revolusi merupakan kata yang paling gagah pada periode perjuangan kemerdekaan kita dahulu. Kata sosial mungkin tidak seseram kewacana, tapi tah orang sekarang masih merasa perlu memadai dengan kata religius supaya benar-benar "aman".

Maka mengikuti mode persyaratan, kata revolusi sebaiknya kita gunakan dengan Perubahan atau kalau mas tidak halus lagi: Pembaharuan, atau kalau mau akul pakai kata pajah: modernisasi. Sosialisme kita sebut saja ideologi. Sedangkan Pimpinan (PM) tidak bisa lain, yah pimpinan.

Nah, sekarang sudah pastis, aman dan sesuai, maka RESOPIM untuk dekade '80-an kita-kita dapat dibeber sebagai berikut. Bila kita hendak menajukas atau mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara, maka tiga syarat dipersyaratkan sekaligus ada yaitu: modernisasi, ideologi yang jelas dan terperinci sebagai landasan dan pegangan serta pimpinan yang berwawasan dan berwawasan untuk menggariskannya. Kalau salah satu dari tiga persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka apa yang kita kerjakan tidak akan mengangku atau mana-mana. Kita boleh saja tidak setuju dengan pendapat tersebut, tapi kita-kita akan demikian yang dikatakan oleh Soekarno pada kita seandainya belakar hidup sekarang. Tapi tak ada salahnya kita mengikuti, apakah ketiga persyaratan tersebut diawal ini telah kita miliki dalam memasuki dekade '80-an?

### isi

3. PERSIDALAN KITA: Resopim Dalam Dekade '80-an
4. SURAT-SURAT
5. INDONESIA KINI DAN ESOK:
  - Menelusuri Pangkalan-pangkalan Pendirian Manusia Indonesia Yang Kita Cita-citaikan.
  - Tiga Juta Bangsa Merah Memerlukan Indonesia Tahun 2000
  - Demokrasi sel Syarat untuk Meraih Kemajuan
29. Buku Untuk Anda
30. RESENSI:
  - Sudut-sudut Penikahan Emil Salim

### SERBA TIDAK JELAS

Kita mulai saja dengan unsur yang pertama yakni modernisasi. Kata yang satu ini memang paling jarang dan paling banyak dicapai, ditulis dan dipelajari oleh berbagai kijangsen kita tentunya dalam 10 tahun terakhir ini. Tapi walaupun dikenal dari kata yang satu ini, kejelasannya baru sampai bahwasan modernisasi kita bukan modernisasi itu Benar. Tapi apa itu? Seperti jawab berturut-turut, tapi kesesuaianya berupa rumusan kata-kata tersebut alias tidak jelas, tak dapat dijadikan pegangan. Unsur pertama ini memang tidak pemaham akan dapat jelas dan tak ringkas. Maaf perihal kata unsur persyaratan kedua tidak kita miliki yaitu ideologi. Berbicara tentang unsur kedua ini dengan lajang pasti kita akan mengalihkan bahwa kita memiliki nya pada Pancasila. Tapi sejauh ini harus kita akui sebagai ideologi Pancasila tidak merupakan inspirasi dasar. Sebagai inspirasi dasar, Pancasila memang kuat dan tangguh serta sedikit-sedikit telah menyemarakkan bangsa dan negara kita dari ancaman kehancuran. Tapi pengembangannya sebagai ideologi sampai saat ini belum belum, masih terbatas dan diperlambatkan, konon antara lain hal hal yang sedang dilakukan melalui penetapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Tapi yang pasti unsur persyaratan kedua yaitu ideologi dalam arti lengkap dan utuh masih osak, mengambang, belum bukti kita miliki. Itu antara lain sebabnya unsur pertama yaitu modernisasi, coraknya menjadi aneka ragam, tergantung stepa yang memakainya.

Unsur persyaratan ketiga yaitu pimpinan yang berintak dan berwawasan, apakah sekarang ini. Jumlahnya cukup kita miliki setiap resatu pada tiga bidang kegiatan hidup, jawabnya: belum. Bila dimiliki halnya, dari RESOPIM, dalam dekade '80-an ini, unsur massa yang telah kita miliki? Tanpa bermakna menjawab, sedikit-sediknya dengan peralatan RESOPIM, kita dapat lebih memahami noda-noda kerusakan yang dikumandangkan oleh beberapa kalangan masyarakat selama 10 tahun terakhir ini.

Keresahan karena tidak pegangan, bek lirik sebuah lagu: Oh angin, kenapa engku berdua? (L.W.).

- Islam Indonesia: Wawas Diri atau Menepuk Dada?
- Pelajaran Dasar Ilmu Terpadu Listrik
- Tragedi Sayaji,
- 36. Bersama Hidup Antara Manusia dan Binatang
- 44. Perpusatkan Harla Karun Yang Masih Dilupak
- 50. DAFTAR PUSTAKA
- 59. KIRIMAN DARI PEMERINTAH
- 60. Bagaimana Rakyat Amerika Memilih Presiden Tahun 1980?
- 74. NOMOR ANGGOTA

# INDONESIA KINI DAN ESOK

FRANS SUSENO:  
sambungan OPTIMIS no.6

## Demokratisasi Syarat Untuk Mencapai Kemajuan



### MENTALITAS

Saya mengharapkan suatu modernitas yang berasal dari kebutuhan dan kesempuan serta cita-cita Indonesia sendiri. Bukan dalam isolasi. Belieh saja dalam ranggangan oleh faktor-faktor luar. Tapi pola, dalam apa yang kita sebut modern, jangan hendaknya kita jipik dan luar, dari manusia juga. Dalam menghadapi segala macam tantangan, kita harus mampu berpikir sikap yang sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Nah, pikiran yang menyatakan bahwa kepribadian suatu Indonesia harus diabu-abu, baru bisa maju saya anggap salah. Mereka yang kepribadian setiap orang dan setiap bangsa termasuk mengalami suatu perubahan dihadapkan dengan tantangan-tantangan, itu dengan seadanya. Tetapi mengingatkan, orang Indonesia harus lebih dahulu membangun kepribadiannya yang lama, baru bisa berkembang benar-benar ketika. Saya melihat ini sebagai suatu ideologi dari golongan elite. Anehnya justru di Indonesia sering dikatakan, kita ini merupakan mentalitas yang tidak sesuai dengan pembangunan. Apa fungsi pernyataan itu?

Pernyataan itu berarti: kalau kita ikuti mentalitas masyarakat, maka kita tidak bisa membangun. Tidak bisa membangun berarti kita tidak bisa memecahkan masalah-masalah nasional yang ada. Jadi dalam membangun perlu ada suatu elite yang memimpin seluruh masyarakat, yang mesujiukkan jalan, menentuskan langkah dan arah, membimbing dan mengiringi masyarakat agar berkembang modern. Kalau kita cari inti dari pendapat tersebut, saya lihat intinya adalah bahwa kaum elite dengan demikian juga berhak untuk memimpin masyarakat lais. Dengan memimpin mereka juga berhak atas orang lain. Berkaca pada disadari atau tidak — mungkin maa — selalu akan berarti berada dalam kedudukan yang menguntungkan karena bisa menjamin lebih banyak kekayaan dari hasil kerja masyarakat bagi dirinya sendiri dan kelompoknya.

Kembali pada soal memodernisasikan Indonesia, alat-alat yang memang kita perlukan, dapat saja kita ambil dari teknologi dan ilmu pengetahuan Barat, tapi bujannya harus dicari dalam masyarakat kita sendiri. Kita dapat saja meranggang masyarakat tetapi tidak dengan cara mengurangi ini dan itu, melainkan dengan merangsangkan sifat-sifat yang sudah selalu ada dalam masyarakat mengenai dirinya kembali dan dengan demikian menjadi dinamis. Sifat-sifat tersebut antara lain: kejujuran, kecelilan, konsistensi, bekerja keras, kesetiaan hidup sederhana asal dalam suasana rukun dan damai. Tidak benar bahwa sifat-sifat ini menghambat modernisasi. Apabila diperlukan dan diranggangan pertambahan, sifat-sifat ini justru akan mendoreng masyarakat untuk meraih segala sesuatu dan daya, guna menciptakan prasyarat-prasyarat ala Barat. Yang memiliki menjadi tajuan kita ialah suatu masyarakat di mana setiap insan Indonesia bisa lepas, bisa merasa aman, merasa terbebas dari

tekanan dan juga bebas dari ketakutan akan hari depan. Membuat orang takut akan hari depan adalah merendahkan martabat manusia. Itu sebaliknya, saya menekankan pentingnya demokratisasi dalam arti agak masyarakat memperoleh kesengatan me mensanakan sendiri jalannya. Untuk itu perlu syarat-syarat tertentu. Saya kira, demokratisasi tidak mungkin tanpa suatu politisi di mana orang dapat mengungkapkan aspirasinya tanpa rasa takut.

Judi salah satu prasyarat bagi berhasilnya modernisasi, mesurut saya, adalah demokratisasi, asal kita tidak mempunyai gambaran fix tentang modernisasi. Dalam konteks ini, modernisasi yang saya maksudkan adalah pembaharuan-pembaharuan yang perlakuan, supaya masalah-masalah penderitaan masyarakat bisa dipecahkan. Bila tidak, kita akan terus-menerus hidup dalam masyarakat di mana ada golongan yang cukup luas, beranggali majoritas, yang merasa terisap tengangnya, yang percaya hidupnya tidak diselamatkan. Saya serupa sekali bukan ahli ekonomi, tetapi sekarang telah ada bangkit pemikiran tentang teori ekonomi modern yang terjadi di negara-negara berkembang, di mana ada sektor kecil dari rakyat yang maja secara otomatis, sedangkan yang lain tidak. Bawha trickle-down effect demikian kecil sehingga akhirnya tak ada yang banah sama sekali. Sehingga kalau sudah di-trickle-down, banhnya sudah hilang semuanya. Jadi, menurut saya, tanpa melibatkan semua pihak, modernisasi akan gagal.

Saya rasa adalah tersinggungnya bahwa dalam melaksanakan modernisasi kita tidak bisa mengigiti Barat, karena masalah yang dihadapi negara-negara Barat, dalam ekonomi, dalam sistem sosial, berbeda sekali dari masyarakat Indonesia. Masalah-masalah negara-negara berkembang dalam tujuh-80-an masih ini pada umumnya, khusus-

susya di Indonesia, adalah masalah yang belum pernah dibhadapi bangsa manapun. Jadi tidak mungkin dipercoba dengan memerlui contoh pada apa yang telah terjadi di negara lain. Barangkali beberapa unsur bisa dilihat, tapi ini pun tidak perlu dilihat, cukup diperhatikan. Karenaanya, manusia tak manusia harus mencari jalan sendiri. Barangkali kita bisa belajar sesuatu dari India, China ataupun Tiongkok. Tetapi mengerti bagaimana bagi saya tidak manusia di sana.

Mesurut hasilnya saya, modal mental adalah identik orang Indonesia. Saya sudah hidup 20 tahun di sini. Walaupun sering sekali dibicarakan berbagai kejadian serta keterbukaan dalam diri manusia Indonesia, namun saya yakin bahwa bilidibersikap pasif, manusia Indonesia pasti bersedia untuk maju, demi dirinya dan demi sejarah keluarganya. Saya konci sedemikian banyak rekan sekerja, teman, orang sederhana, pegawai juga petani — saya pernah hidup di desa di Jawa Tengah — yang memang merupakan manusia manusia yang saya hargai dan hormati, karena menurut benat saya memiliki alih-alih yang perlu untuk membangun suatu masyarakat yang manusiawi. Jadi kalau rakyat Indonesia tidak maju itu bukan karena ada sesuatu yang kurang beras dalam mentalitas mereka, tetapi karena keadaan tidak mengijinkan. Kalau orang kecil, betapapun dia bekerja dengan rajin dan baik, ia tetap tidak bisa lebih maju sedikit pun, tanpa anak aga dia akan bekerja dengan rajin? Hal ini yang saya prihatinkan. Saya mendapat kesan bahwa masyarakat dewasa ini masih diajarkan, kalau mau maju jangan bekerja dengan jujur dan teliti, dan jangan hidup sehat-helix, tetapi carilah kesempatan untuk bisa memborceng. Cari tempat yang "basah". Berorientasi pada orang yang sudah berkelebihan, itulah cara untuk mapu. Ini lama kelamaan merosakkan seseorang.

Dulu habungan ini menganggap baik bilia kaum cerdik-cerdik kita menganggap secara lebih mendalam mengenai apa artinya kalau orang bicara tentang neofeodalisme di Indonesia? Dalam hal ini saya membedakan antara orang-orang desa dan orang-orang yang dato hidup di sektor keraton yang sebagian besar hidup hanya dengan mengambil pangan dari desa, tanpa memproduksi sendiri. Mungkin ada suatu struktur penghisapan yang dijamin封建地主 datuh atau normal, baik di Eropa dan di manapun, tetapi datuh-kombinasi dengan suatu ekonomi yang kapitalistik, dan dengan masing-masing modal asting, menjadi daya pemindah dan penghisap yang besar bisa. Mesurut saya, dalam seorang raja tradisional menghisap rakyat

dengan adanya batas tertentu. Batasnya umumnya pegawai-pegaewainya misalnya cekuk, lambung lambangnya punah dengan baris, termasuk rukup makan, dan sebagainya. Di masa prakapitalistik, menghisap rakyat lebih dari itu tidak manusia akal.

Tetapi dewasa ini, kita hidup di alam kapitalistik, di mana yang kita cari bukan barang tetapi uang. Di sinilah perbedaan antara ekonomi feudalisme dengan ekonomi kapitalisme. Dalam ekonomi feudal, kemampuan golongan atas untuk menghisap merupakan batas penghisapan rakyat. Tetapi di alam kapitalistik yang dicari bukan batas untuk memenuhi kebutuhan kom-

sumi, melainkan modal, dan semakin besar modalnya, semakin besar kemungkinan untuk memperbesarannya lagi. Dan ini suatu perbedaan besar. Jadi data tidak beras intrinsik terhadap penghisapan. Tetapi sekarang, dalam terlepas dari apakah seseorang tidak punya kastifik atau bukan, orang kaya selalu masih mungkin untuk menambah penghisapannya. Dan dia mempunyai peralatan yang bisa bisa untuk melakukan itu, yaitu peralatan modal yang juga seakan-akan bisa membuat segala kebutuhan individu yang ada. Saya lihat hal ini banyak terjadi sekarang. Di Brasil, di mana kapitalisme mencuci dan berkelebihan untuk pertama kali nya

kapitalisme masih berkembang secara naif, artinya dia dipercaya sebagai alat dalam perjuangan melawan feudalisme, sedangkan di sini keadaannya sudah lama.

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, berusaha dengan suatu payah membangun suatu ekonomi dengan tujuan mengurangi ketenggalan dari negara-negara maju, negara-negara industri yang sudah sangat established. Kapitalisme kita adalah kapitalisme generasi kedua atau ketiga, tidak ansi lagi, melainkan suatu substansi dalam sistem ekonomi internasional yang berlangsung sejauh dengan kekuatan kekuatan ekonomi internasional tersebut. Jadi tak mungkin kita mengharapkan seakan-akan kita bisa menentaskan jalan sama seperti Jerman atau Jepang 100 tahun yang lalu, karena adanya suatu similitud. Situasi kita sudah sama sekali berbeda. Tidak dapat dibayangkan bahwa kapitalisme kita sekarang akan memberi hasil yang sama dengan kapitalisme dulu.

Dalam pihak membanting stir secara radikal ke arah sosialisme, kalau dengan sosialisme dimaksud negara yang memiliki dan mengontrol semuanya, sedikit pun tidak saya setujui, malah saya heret. Dan saya yakin sekali bahwa kita bukan Indonesia, tetapi orang-orang kita ini, akan gagal. Bayangan kalau seluruh perekonomian kita dipergantikan oleh birokrat dan pegawai-pegaawi, ya kita lantas mati. Masalah yang dihadapi Indonesia sebenarnya bukan perusahaan-perusahaan dalam negeri melainkan yang luar negeri. Memang tidak seteributnya perlu ditolak. Tapi apakah perenerimaan perusahaan-perusahaan asing tersebut memang ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, masih amat saya ragukan.

Dalam hubungan ini yang menjadikan saya heret adalah di bidang ekonomi kita berlakukan liberalisme yang sekarang-kasarnya tak ada jaminan kerja, upah minimal, perlindungan eksekutif terhadap kesewenongan majikan, jaminan-jaminan dan asuransi sosial. Tetapi di bidang politik, kita anti-liberal, anti kebebasan berserikat, anti hak-hak asasi, jadi di situ pihak kita membuka pintu lebar-lebar bagi merajalelaan usaha cari untung kaum pengusaha, di lain pihak unsur-unsur melindungi buruh, yang bisa dipakai untuk memanusiakan pembangunan, secara sistematis kita matikan.

Di samping itu saya pun heret tentang nasan-nasan hal yang dewasa ini diajak dengan sulit tidak mencerminkan keindonesiaan. Kadang-kadang saya mendapat konan bahwa yang ditolak sebagai bukan Indonesia adalah hal-hal

yang bisa mengganggu mereka yang berkedudukan sekarang. Jadi, jika orang masuk membawa demokrasi, harus dirintahkan bahwa liberalisme yang bertentangan dengan prinsip mayapawaroh-nufuk dan kekeluargaan. Atau bisa orang membawa-bawa hak-hak manusia, dikatakan itu semangat individualitas dari Barat yang tidak senonoh dengan masyarakat kita. Mungkin emosi-emosi ini sebenarnya tidak bertentangan dengan kebudayaan Indonesia se sejatinya, malainkan dengan kalter politik dan ekonomi sekarang. Itu saja. Begitu juga dengan masalah Hawaian. Itu memang bukan masalah Indonesia, tetapi mengapa hanya Hawaian yang ditolak dengan olesan bukan Indonesia, sedangkan sejauh macam musik dari Isar-negen yang jelas-jelas bukan Indonesia tidak ditolak? Kalau keroneong atau macam-macam musik tradisional lainnya, barangkali bisa disebut musik Indonesia. Tetapi kebanyakan lagu pop yang ada di sini, bisa juga kita dengar di mana-mana di dunia. Mengapa yang itu tidak ditolak?

Dalam pihak, mesarut hemat saya, kebudayaan suatu bangsa tidak bisa dipertahankan, apalagi dikembangkan, apabila dia dilakukan di bantark dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Suatu bangsa berkembang dalam dialog, dalam menghadapi tantangan-tantangan. Setiap tantangan dari Isar, apa diterima atau ditolak, bagaimanapun juga mengubah kita. Kalau saya menghadapkan sesuatu kepada saudara, saudara menserius atau mensiasat, saudara bersabeh, karena sudah tidak seperti sebelumnya. Denikian juga tidak ada saudara Indonesia termasuk keluarga bangsawan dan tertib dalam persatuan kekuatan-kekuatan internasional. Itu normal. Kalau mau mensiasat sesuatu mestil disertai argumentasi yang jelas dan masuk akal.

## ARAH PEMBANGUNAN

Sejak tahun 50-an, kita selalu sibuk dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mendesak. Masalah-masalah tersebut kita coba pecahkan satu-satu. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya suatu masyarakat yang semakin tidak sama-sama-sama-rata. Di mana ada golongan yang semakin terus maju, terus kaya, sedangkan golongan lain tetap sama saja, semakin jauh jangkauannya dari gaya hidup golongan atas. Sebaliknya, kita menyadari bahwa usaha pemecahan kecelakaan selalu sudah dilandasi suatu kerangka yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Kerangka tersebut adalah kepentingan para perencana, para pengrajin yang tidak boleh dibahayakan. Hal ini masih berjalan terus sam-

pai sekarang. Akibatnya, tercipta suatu bentuk pembangunan yang sesuai dengan kepentingan mereka yang meminta. Kalau kita berjalan terus bangsa seperti sekarang, sampai kapan pun masyarakat adil dan makmur tidak akan tercapai. Barangkali makmur buat beberapa, tetapi adil pasti tidak.

Menterang arus tersebut tidak berarti ketundian kita harus membangun suatu teori ekonomi mulai dari titik nol. Sekjak tahun 50-an ilmu ekonomi secara intensif membebaskan diri dengan masalah seperti yang kita hadapi. Kritik terhadap model pembangunan yang hendak menciptakan modal dulu, baru memikirkan pemerataan, sebetulnya sudah lama dilakukan secara ilmiah. Juga tidak perlu kita menelurkan suatu rencana pembangunan semesta baru sebagai ganti rencana yang sekarang. Menurut hemat saya, kita cukup bertolak dari kritis-kritis yang ada. Maka ijinkan saja kritis-kritis bebas terhadap dall-dall ekonomi yang mendesak pembangunan ekonomi sekarang, tentunya segi-segi negatif yang terlahir dan tersisa. Biarkanlah para ahli ekonomi yang tidak dedik pada eksekutif menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Hasil diskusi sesiemi itu bukan hanya untuk sekedar mengakomodasi kritis, melainkan dapat diharapkan akan cukup banyak posisi fundamental yang terungkap. Kalau posisi-posisi baru tersebut dibawa dan diperbaiki, dibela dan didiskusikan secara umum, maka akan menjadi alternatif-alternatif yang sungguh-sungguh terhadap politik pembangunan sekarang.

Jadi, yang kita perlukan bukan menjatuhkan segala apapun sampai sekarang kita rancang dan di bidang pembangunan. Tidak perlu dipersoalkan apakah "sistem" sendiri perlu ditumbangkan atau tidak. Kita mestil bertolak dari yang ada, dari yang dijalankan sekarang. Pada prinsipnya saya memilih reform daripada revolusi, karena revolusi saya anggap jalan terakhir dengan resiko yang teramat besar justice bagi masyarakat kecil. Adalah terlalu berbahaya kalau kita sekarang mau membanting stir sama sekali dan mengganti sistem pembangunan sekarang dengan salah sistem apriori yang baru.

## KEMAKMURAN DAN DEMOKRASI

Sering disuarakan bahwa kita harus menciptakan demokrasi dulu, baru kita pikirkan desolensi. Demokrasi dimaksud sebagai barang luas bagi negara-negara berkembang. Saya menolak bahwa keamnitasan dan demokrasi ditempatkan sebagai kontradiksi. Saya

tidak setuju dengan pendapat bahwa janji-janji terhadap hak-hak asasi harus ditunda dalam demikian pemenuhan basic needs. Bagi saya, demokrasi dan hak-hak asasi termasuk basic needs masyarakat sederhana. Sering dikatakan bahwa masyarakat sederhana tidak mengerti sesuatu tentang hak-hak asasi. Saya kira itu tidak benar. Pelaksanaan hak-hak asasi bagi rakyat kecil berarti tidak perlu takut tanah mereka dirampas, tak perlu takut ditangkap apabila membela hak-hak mereka, apabila menyuarakan kepentingan mereka. Hak-hak asasi terjamin berarti mereka berhak memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka secara wajar, membela keanekaragaman yang disengani, bisa membentuk serikat buruh sendiri. Dan demokrasi berarti mereka berhak menentukan nasib mereka, cara hidup mereka, cara kerja mereka sendiri.

Menyadap pemenuhan basic needs terhadap pelaksanaan hak-hak asasi, berarti persikiran yang melihat masyarakat hanya sebagai angkuh-angkuh yang tidak punya arti terlalu penting. Demi kesaksianan, gua saja saja beberapa orang. Tapi demi kesaksianan siapa? Demi kesaksianan mereka yang enggan? seorangnya hal itu kembali pada masalah tujuan pembangunan. Apa yang sebenarnya kita hendak? Mengejar pola hidup masyarakat di Barat? Kalau begitu, lebih baik kita singkirkan 50 juta orang Indonesia, stanya pasti akan bisa maju dengan lebih cepat. Tapi saya beranggapan dilihati dari segi ilmu ekonomi, tips-harapannya bahwa masyarakat kita akan pernah mendekati gaya hidup masyarakat di negara-negara industri. Kalau kalangan industri di Jerman Barat saja sudah khawatir sungguh-sanggup bahwa mereka akan ketinggalan dengan Amerika Serikat dalam bidang elektronika, bagaimana negara seperti Indonesia bisa mengharapkan menyusul di bidang teknologi? Jadi tujuan seperti itu adalah tak masuk di akal.

Akan tetapi, apakah gaya hidup ala Barat memang merupakan suatu tujuan yang sejauh bagaimana? Apakah orang-orang di Barat seungguhnya jauh lebih bahagia diperlakukan? Memang, orang yang lapar dan miskin, tidak merasa bahagia. Karena itu kemiskinan perlu diberantas. Tetapi berlepas dari itu, kebahagiaan hidup bersama tidak selaras dengan cara mencapai suatu masyarakat seperti yang ada di Barat. Tujuan perbaikan seharusnya menciptakan sarana-sarana agar manusia Indonesia bisa hidup dengan sederhana dan tenetan, dengan selamat dan sejahtera, bebas dari macam-macam ketakutan, macans-macan penderitaan yang tidak

perlu. Tetapi menganti rumah gedeg dengan rumah tembok belum tentu merupakan tujuan yang harus dilekar.

Hal itu tidak berarti bahwa kita mewajibati diri pada tradisi-tradisi dahulu, pada gaya hidup cara lama. Sebaliknya tidak mungkin, akan Indonesia yang kita di antar sekarang sudah berbeda dengan dulu. Sudah diubah dan dirasuk oleh kekacauan ekonomi internasional, termasuk pemecaman lingkungan, struktur-struktur sosial lama sudah tidak utuh lagi. Kesejahteraan tidak akan terecap dengan standar ke mana lajuap. Tetapi juga tidak dengan menjiplak sesuatu begitu saja dari luar. Yang perlu ialah bahwa kita, kaum intelekt, berhenti berlagak seakan-akan kritis yang harus berpikir demi masyarakat kecil. Jadi bila kalian masyarakat mensejukkan dinamika yang sendiri. Tak perlu kita yang menentukan apa yang harus diajibl dari dunia modern dan apa yang dilarang-larang para nenek moyang. Biarkan orang Indonesia sekarang seadanya saja berhadapan dengan tantangan-tantangan yang diajukan oleh masyarakat mereka meskipun identitasnya. Selain lagi, yang diperlukan adalah suatu demokratisasi.

## MASALAH POLITIK

Demokratisasi tidak berarti kembalikan demokrasi parlementer soalan 50-an. Tidak berarti menjadikan posisi pemerintah harus lemah. Demokratisasi bagi saya berarti melanjutkan UUD '45 secara konsekuensi, dengan mengisi kekoaksamaan-kekoaksamaan yang masih ada. Demokratisasi berarti membuat penekatan paternalistik dari atas, karena paternalisme itu hanyalah suatu kedekat bagi keinginan golongan elite untuk tidak merugikan kedudukan mereka dengan rakyat biasa.

Namun, meskielah saja tentang hal itu tidak akan mengubah situasi. Yang jelas, kerangka politik pembangunan tidak bisa begitu saja ditentukan oleh beberapa orang, tetapi pun batanya maknud mereka. Karena sulit dinggah akan timbulnya kepentingan-kepentingan modal seperti lazimnya pada tiap masyarakat. Yaitu antara kepentingan golongan atas dalam negeri dan kepentingan kekuatan luar negeri. Bagi saya, yang harus meneruskan adalah kekuatan-kekuatan dalam negeri. Tapi kita, jauh segeri tidak bisa berdaya apa-apa. Lihat contoh Iran: Amerika yang begitu kuat toh tidak bisa apa-apa. Atau seperti Sozial yang negaraja miskin, tetapi berani membangun Rusia. Rusia hanya bisa menggerudi. Jadi kitalah yang seharusnya meneruskan peranan mereka di bumi kita. Tapi apabila kita membangun suatu ekonomi

yang pertama-tama diarahkan ke pasar internasional, maka konsekuensinya kita akan terganggu dari mekanisme mereka.

Menumbuhkan kekuatan dalam negeri tidak perlu dengan suatu revolusi. Buruh-buruh di Eropa Justru berhasil memperbaiki keadaan hidup dan memperoleh kedudukan tanpa revolusi. Caranya dilakukan langkah demi langkah memperjuangkan hak-hak mereka melalui perjuangan ekonomi dan politik. Justru dengan perjuangan itu ketegangan-ketegangan sosial yang tajam di Eropa abad lalu dapat dikurangi. Agar golongan-golongan bawah di masyarakat kita bisa berjaya, mereka harus memperoleh kesempatan mengorganisasikan diri. Di bidang ekonomi, misalnya partai-partai politik. Hal ini tidak akan menggariskan stabilitas politik di Indonesia, melainkan memperkokohnya karena ketegangan-ketegangan sosial yang ada sekarang dapat direduksikan. Kenyataan selama ini, sejak PKI jatuh, dan PNI sayap kiri juga jatuh, tidak ada lagi partai politik yang secara olahraga menyuarakan rakyat kecil. Justru kalau kita tidak ingin PKI muncul kembali, kekosongan di spektrum politik kiri itu musti kita pikirkan. Golongan bahan sebenarnya mempunyai potensi untuk menyuarakan rakyat kecil. Tetapi saya baru melihat beberapa kelompok kecil di dalamnya yang sangat-sangat memperhatikan masalah tersebut.

Bila kita dihadapkan dengan pertarungan apakah semua gelar sekarang merupakan pertanda kemunduran kebudayaan Indonesia ataukah justru awal dari kelahiran suatu kebudayaan baru, jawabannya mazurku hasil saya tergantung pada kita semua. Das-dua-duanya mungkin. Tetapi jelas, alternatif pertama, keruntihan kebudayaan Indonesia, tidak perlu kita persikikan. Selama masyarakat tidak kita sekarang, tidak kita percayakan dan memperoleh kesempatan mengembangkan dinamikanya sendiri, kebudayaan Indonesia akan tetap mempertahankan identitasnya dalam perubahan-perubahan yang sedang kita alami.

Kita tidak perlu ideologi yang muluk-muluk, tetapi kita juga tidak memerlukan suatu posisi kolonialisme dari atas. Kita perlu suatu keterbukaan dalam masyarakat, kewaspadaan untuk menyuarakan jorjian kooperasi dan mampu terdapat. Kelebasan untuk menentang apa yang merusak tidak beres. Partai-pardidari sebagian yang mengikuti pihak dalam usaha ini.